



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SURAT TUGAS

Nomor :888e/In/U

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta memberikan tugas kepada :

Nama : Lukas Deni Setiawan,MA.
Jabatan : Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY
Tugas yang diberikan : Menulis di Media Massa berjudul "Uji Coba Televisi Digital"
Masa menjalankan tugas : Semester Gasal TA 2016/2017

Diharap yang berwenang sudi memberikan bantuannya, apabila diperlukan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 Agustus 2016
Dekan

Dr. MC Ninik Sri Rejeki, M.Si.

Tembusan :
Kaprodi Ilmu Komunikasi

Uji Coba Televisi Digital

BERNAS
12/4/16

Oleh:
Lukas Deni Setiawan
Dosen Program Studi Ilmu
Komunikasi, FISIP,
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta



ISU siaran televisi digital timbul tenggelam. Beberapa tahun lalu isu tersebut digulirkan dengan kencang dan menuai banyak masukan, protes, serta gugatan. Juni kemarin, pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menginisiasi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) uji coba penyelenggaraan televisi

digital. MoU disepakati oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai penyelenggara multipleksing dengan 36 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebagai penyedia konten siarannya (kominfo.go.id, 9/6/2016).

Menteri Kominfo Rudiantara, mengadag-gadag uji coba siaran di 20 lokasi tersebut dapat mempercepat

migrasi siaran televisi dari analog ke digital secara riil. Uji coba yang sedianya berlangsung 6 bulan, mulai 15 Juni hingga 15 Desember 2016, diharapkan dapat mengetahui berbagai kebutuhan serta kendala teknis dan nonteknis penyelenggaraan televisi digital. Kabarinya, aspek teknis dan nonteknis tersebut menyangkut kinerja perangkat dan sistem ▶ ke hal 7

penyiaran multipleksing, perencanaan dan konfigurasi jaringan, fitur layanan data, dan model bisnis penyelenggaraan siarannya (teknokompas.com, 9/6/2016).

Pertanyaannya, tercakupkah isu besar sosio-kultural migrasi analog ke digital, yaitu kesenjangan akses siaran televisi serta keberagaman isi dan pemilik dalam uji coba?

Teknologi tepat sasaran

Jepang sudah digital dan 120 negara lain juga sudah merencanakannya sejak dekade lalu. Bahkan, melalui Geneva Agreement tahun 2006 (GE06), negara-negara tersebut berniat menyelesaikan migrasi analog ke digital pada Juni 2015. Sementara itu, kita baru merencanakannya secara

resmi sejak 2011 dan kini baru melakukan uji coba. Kesadaran keteringgalan ini memicu kesegeraan kita bermigrasi dalam hal teknologi siaran televisi. Namun, kesadaran tersebut ada bukannya dikelola dengan bijak untuk tidak menjadi keterburuan yang miskin pertimbangan.

Teknologi tidak hanya soal penggunaan alat atau mesin (hardware), tapi juga software sebagai basis informasi bagi hal-hal teknis tersebut (Adiputra, 2008). Ia biasanya mengandung pula sebab-akibat dari aspek ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Dalam konteks ekonomi misalnya, Baiguni (1983), mantan Dirjen BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional), pernah menyatakan, "Teknologi bukan cuma soal benda atau mesin-mesin... yang lebih penting dari benda-benda belaka adalah proses suatu masyarakat menyediakan modal, manajemen, pihak-pihak yang mendisain, merencana, memproduksi, mendistribusi, memasarkan benda-benda hasil teknologi tersebut dalam rangkaian kegiatan ekonomi".

Hal ini pula yang ditegaskan oleh Everett M. Rogers (1986), mengenai teknologi komunikasi, yaitu, "Communication technology is the hardware equipment, organizational structures, and social values by which individuals collect, process, and exchange information with other individuals." Beberapa keterangan mengenai teknologi tersebut mengginggirkan pemahaman kita pada satu pengertian bahwa implikasi perkembangan teknologi tidak hanya bekerja pada tataran teknis, tetapi juga pada semua aspek yang melingkupinya, termasuk struktural dan sosio-kultural.

Salah satu implikasi perkembangan teknologi komunikasi adalah banjir informasi. Namun, dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, hal ini tidak dapat dirasakan secara seimbang oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya lapisan masyarakat tertentu saja yang bisa menikmati limpahan informasi tersebut. Mereka ini terutama adalah kalangan masyarakat yang akses terhadap informasinya sudah sangat terbuka. Sementara, sebagian masyarakat yang lain jauh dari mudah. Mereka inilah yang seharusnya mendapat solusi dari penerapan teknologi baru sehingga kesenjangan bisa ditekan.

Dengan demikian, kecenderungan implikasi buruk perkembangan teknologi komunikasi pun dapat diantisipasi. DeFleur dan Dennis (1985) telah mengingatkan kita

jauh-jauh hari, "What if only relatively affluent people obtain cable and other information services? The poor and dispossessed will be left behind. This will create a society of information-rich and information-poor people, and in modern times—when information is power—this could be devastating to society and split the nation apart."

Tepat guna

Uji coba teknologi komunikasi terbaru, selain harus memikirkan kemudahan akses bagi semua kalangan, juga wajib mempertimbangkan kualitas konten. Salah satu esensi dari proses komunikasi adalah kualitas pesan yang beredar. Oleh karena itu, tak mungkin kita mengusahakan kemajuan kualitas komunikasi masyarakat tanpa melakukan penjagaan ketat pada kualitas informasinya.

Mengenai hal ini, potensi teknologi digital harus dimanfaatkan secara optimal. Satu kanal frekuensi yang bisa dipakai hingga 12 saluran siaran merupakan potensi besar bagi keberagaman isi program televisi. Kita mengingat bahwa sebagian besar siaran televisi nasional kita hanya dikuasai oleh sebagian kecil golongan. Pemusatan kepemilikan mengentalkan keseragaman. Oleh karena itu, keberagaman penyediaan konten pada penyelenggaraan televisi digital ini harus diusahakan lebih menjamin kekhasan dan keunikan alternatif program-program siaran.

Kesetaraan dan pemenuhan hak publik atas akses terhadap keberagaman informasi adalah anak kandung dari sistem demokrasi. Demokrasi adalah sebuah pilihan politik suatu negara yang memberi tempat bagi mekanisme koreksi dari semua pihak untuk tata kelola yang lebih baik. Indonesia mengaminkannya setidaknya sejak reformasi 1998. Dengan demikian, kita sepakat bahwa negara harus menghormati dan memperjuangkan hak-hak dan kebebasan warganya, di antaranya dalam bentuk jaminan terhadap freedom of the press, freedom of the expression, dan freedom of voices. Dalam ranah kehidupan bermedia, negara harus menjamin pula diversity of content dan diversity of ownership (Siregar dalam Rianto, dkk., 2012).

Ujian kepekaan

Seberapa jauh pemerintah peka terhadap kondisi masyarakat dapat tercermin dalam uji coba televisi digital hingga akhir tahun 2016? Dalam uji coba ini, pemerintah sekaligus menjadi subjek yang diuji kepekaannya terhadap permasalahan komunikasi. Pen-

guangan kesenjangan akses serta keberagaman pemilik kanal dan penyedia konten harus dijamin pemerintah. Aspek nonteknis yang juga digadang menjadi salah satu objek pengamatan selayaknya menjadi sorotan berbagai pihak. Evaluasi uji coba sudah selayaknya dibuka untuk menjadi referensi berbagai kalangan masyarakat, terutama nonpemerintah, akan kesiapan atau ketidaksiapan kita menjelang digitalisasi ini, supaya kritik tetap bisa terus dilayangkan.

Isu kepemilikan kanal dan penyedia konten pada proses digitalisasi juga tak bisa lepas dari wacana konvergensi media. Menurut Nugroho, Putri, dan Laksmi (2012), konvergensi media akan mengintegrasikan semua kanal media. Hal ini dapat menjadi penggerak

potensi terjadinya konglomerasi. Dalam beberapa hal, konglomerasi memungkinkan menjadi konsekuensi langsung dari model bisnis baru yang dibutuhkan untuk bertahan pada era digital.

Banyak pihak kemudian mengarahkan kekhawatirannya kepada segelintir pemain media yang diduga membentuk konglomerasi menggunakan konvergensi media. Kekhawatiran tersebut mendukung bahwa segelintir pemain media inilah yang menguasai hampir semua lini kehidupan bermedia di Indonesia, baik media penyiaran, cetak maupun online. Khusus dalam proses digitalisasi televisi ini, pemerintah harus terbuka dalam setiap aktivitas menentukan pihak-pihak yang akan menguasai kanal dan menyediakan konten siarannya. Tetap berkuasanya segelintir golongan, tak akan mengubah kondisi komunikasi masyarakat Indonesia saat ini, seberapa pun canggihnya teknologi baru yang diterapkan. ***